



Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pajak Daerah dan Dana bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Uzma^{1*}, Ahmad Ridha², Hidayatullah³

¹⁻³Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Samudra Langsa, Indonesia

Email: uzmau5455@gmail.com^{1*}, ahmadridha@unsam.ac.id², hidayatullah@unsam.ac.id³

*Penulis Korespondensi: uzmau5455@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of government expenditure, local taxes, and revenue sharing funds on the economic growth of districts/cities in Aceh Province. This study uses a quantitative approach with secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The research data covers 10 districts/cities in Aceh Province during the period 2016–2025. The analysis method used is panel data regression with model selection stages through the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier test. The results show that government expenditure and revenue sharing funds have a negative and insignificant Effect on the economic growth of districts/cities in Aceh Province. Meanwhile, local taxes and revenue sharing funds have a positive and significant Effect on economic growth. Simultaneously, government expenditure, local taxes, and revenue sharing funds have a significant Effect on economic growth. This study is expected to be a consideration for local governments in formulating Effective and sustainable fiscal policies.*

Keywords: *Economic Growth; Government Expenditure; Panel Data; Regional Taxes; Revenue Sharing Funds.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pajak daerah, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data mencakup 10 Kabupaten/Kota selama periode 2016–2025. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pemilihan model melalui Uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil menunjukkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Pajak daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mendorong pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya serta memperkaya literatur mengenai desentralisasi fiskal dan pembangunan ekonomi regional di Indonesia secara komprehensif dan aplikatif.

Kata kunci: Dana Bagi Hasil; Data Panel; Pajak Daerah; Pengeluaran Pemerintah; Pertumbuhan Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Pengeluaran pemerintah adalah instrumen utama kebijakan fiskal yang mencakup seluruh alokasi dana yang digunakan negara untuk menjalankan fungsinya, seperti pembangunan, penyediaan layanan publik, serta pemenuhan tanggung jawab sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Di tingkat daerah, belanja pemerintah disebut belanja daerah, yaitu seluruh kewajiban yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih daerah dalam periode anggaran tertentu, yang dikeluarkan dari kas umum daerah dan tidak dapat diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah secara garis besar terbagi dalam belanja langsung yang terkait pelaksanaan program dan kegiatan, serta belanja tidak langsung seperti gaji pegawai dan transfer dana. Komponen utama belanja daerah meliputi belanja operasi (pegawai, barang dan jasa, subsidi, bunga, bantuan sosial, dan hibah), belanja modal, belanja tak terduga, dan

belanja transfer. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja daerah sangat penting, karena dana ini berasal dari pajak dan sumber lain yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Ramadhani *et al.*, 2024).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah dari penduduk atau badan usaha di wilayah yurisdiksinya, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarannya. Pajak ini sangat penting sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah, sehingga menjadi indikator utama keberhasilan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Jenis pajak daerah terdiri atas pajak Provinsi seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan dan pajak Kabupaten/Kota, misalnya pajak hotel, restoran, hiburan, serta reklame. Penetapan dan pengelolaan pajak daerah diatur melalui peraturan daerah untuk menghindari tumpang tindih dengan pajak pusat, serta memastikan efektivitas dan efisiensi pemungutannya. Efektivitas pajak daerah tercermin dalam pencapaian realisasi penerimaan dibanding target, serta kontribusinya terhadap PAD. Optimalisasi penerimaan pajak dapat memperluas ruang fiskal pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, sehingga pada akhirnya mendorong kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar pemungutan pajak berjalan optimal dan mendukung desentralisasi fiskal yang berkelanjutan.

Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Provinsi Aceh diberikan karena Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah dan status otonomi khusus yang diakui oleh pemerintah pusat. Dana ini merupakan bagian dari mekanisme desentralisasi fiskal untuk mengembalikan sebagian pendapatan dari sumber daya alam dan pajak yang dihimpun di Aceh kepada pemerintah daerah. DBH mendukung pembiayaan pembangunan daerah serta pelayanan publik, sekaligus mendorong keseimbangan fiskal vertikal antara pusat dan daerah berdasarkan potensi produksi. DBH terbagi menjadi DBH pajak dan DBH bukan pajak, dengan sumber daya alam seperti minyak, gas, kehutanan, pertambangan, dan perikanan menjadi sektor utama penghasil DBH bukan pajak. Dana ini memperkuat kemandirian fiskal Aceh dengan menyediakan sumber pendanaan penting untuk membiayai belanja daerah, yang tidak berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Asas utama penyaluran DBH adalah prinsip "sumber", dimana alokasi dana disesuaikan dengan kapasitas produksi daerah, kecuali DBH perikanan yang didistribusikan merata. Dengan demikian, DBH memfasilitasi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat Aceh sesuai dengan otonomi khusus yang dimilikinya (Rahmah, 2016).

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting yang mengukur kenaikan produksi barang dan jasa suatu daerah dari waktu ke waktu, menunjukkan keberhasilan pembangunan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. PDRB mencerminkan aktivitas ekonomi di tingkat nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dan pertumbuhan PDRB menunjukkan peningkatan kapasitas produksi serta kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan meningkatkan kegiatan produktif masyarakat dan pelaku ekonomi secara berkelanjutan. Secara jangka panjang, pertumbuhan ini tercermin dalam peningkatan output per kapita, yang berkontribusi pada peningkatan daya beli dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi guna mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren kenaikan tahunan di semua daerah, meskipun tingkat pertumbuhannya relatif moderat. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah stabil dan diperkirakan akan berkembang, kemungkinan karena kombinasi pengeluaran pemerintah dan peningkatan kekuatan fiskal daerah (Romhadhoni *et al.*, 2018)

Mengenai pengeluaran pemerintah (belanja daerah), sebagian besar Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi. Misalnya, Aceh Utara dan Pidie menunjukkan peningkatan pengeluaran pada tahun-tahun tertentu, tetapi tidak setiap tahun. Daerah seperti Bireuen dan Aceh Timur, di sisi lain, mengalami periode penurunan pengeluaran sebelum pulih. Pola ini mencerminkan penyesuaian kebijakan fiskal daerah, yang dipengaruhi oleh prioritas pembangunan dan kapasitas anggaran. Secara teoritis, peningkatan pengeluaran daerah seharusnya merangsang pertumbuhan ekonomi melalui efek pengganda. Namun, data yang tersedia menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran tidak selalu menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Pajak daerah menunjukkan tren kenaikan di hampir semua daerah, khususnya selama periode 2024–2025. Banda Aceh dan Aceh Besar mengalami peningkatan penerimaan pajak yang signifikan dibandingkan daerah lain, menunjukkan peningkatan kemampuan daerah-daerah tersebut dalam memanfaatkan penerimaan pajak daerah. Kenaikan penerimaan pajak daerah ini dapat diartikan sebagai indikator peningkatan aktivitas ekonomi dan pengelolaan pajak yang lebih efektif. Namun, kontribusi pajak terhadap pertumbuhan ekonomi tampak tidak

langsung, karena beberapa daerah dengan kenaikan pajak yang signifikan hanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang bertahap.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) cenderung menurun di beberapa daerah, seperti Aceh Utara dan Lhokseumawe, meskipun fluktuasi diamati di daerah lain. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat atau penurunan pendapatan dari sumber daya alam. Situasi ini berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal daerah, khususnya daerah yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Namun, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu parah, karena beberapa daerah mengalami peningkatan pertumbuhan meskipun DBH menurun.

Secara keseluruhan, hubungan antara pengeluaran pemerintah, pajak daerah, dan Dana Bagi Hasil, serta Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan pola non-linier. Meskipun Pertumbuhan Ekonomi cenderung meningkat secara stabil di semua wilayah, hal itu tidak selalu dipengaruhi secara langsung oleh fluktuasi variabel fiskal individual. Ini menunjukkan adanya faktor-faktor lain. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut menggunakan metode seperti regresi data panel diperlukan untuk secara empiris menyelidiki pengaruh masing-masing variabel terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal. Menurut Sukirno (2004), pengeluaran pemerintah yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu iuran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa balas jasa, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Menurut Siahaan (2013) pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di

daerah. Kontribusi pajak daerah merupakan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total PAD dalam satu tahun (Nusa dan Panggalo 2022).

Dana Bagi Hasil

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordiawan, *et al.*, 2007). DBH merupakan dana yang bebas digunakan oleh pemerintah daerah, kecuali DBH yang berasal dari bagi hasil cukai tembakau. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Wandira, 2013). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah alokasi dana dari APBN untuk daerah otonom yang ditentukan berdasarkan persentase dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Bagi Hasil berfungsi agar tidak terjadi ketimpangan antara pemerintah pusat dengan daerah dan memberikan perhatian terhadap daerah penghasil.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara (Arifin, 2016). Dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional riil yang dicapai satu Negara (Ernita *et al.*, 2013). Pertumbuhan ekonomi yaitu, proses dimana perekonomian suatu negara mengalami perubahan berkelanjutan mengarah ke keadaan yang lebih baik dari sebelumnya dalam periode tertentu (Kemenkeu, 2018). Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dapat dibandingkan pada pertumbuhan periode sebelumnya atau dengan wilayah lain (Rizky *et al.*, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pajak daerah, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan daerah dan publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dengan cakupan 10 Kabupaten/Kota selama periode 2016–2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Pemilihan model dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model (CEM),

Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t (parsial), uji F (simultan), serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kontribusi variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemilihan Model Data Panel

Uji Chow

Untuk mengetahui model panel yang digunakan maka pengujian yang dilakukan menggunakan *chow-test*, dengan asumsi yaitu:

H₀: Model CEM

H_a: Model FEM

Pedoman yang digunakan untuk menafsirkan uji *chow* adalah, jika nilai $p > 0,05$ H₀ diterima, jika nilai $p < 0,05$ H_a diterima. Jika model yang dipilih adalah *fixed Effect* model, Uji *Hausman* kemudian digunakan untuk menentukan apakah penelitian tersebut menggunakan model FEM atau REM. Berdasarkan Uji *Chow* diperoleh estimasi sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji *Chow*.

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	149.407432	(9,87)	0.0000
Cross-section Chi-square	280.068658	9	0.0000

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel hasil Uji *Chow* menunjukkan bahwa nilai Prob $0.0000 < 0,05$, maka yang terpilih adalah model FEM.

Uji Hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih antara metode FEM atau metode REM, pengujian yang dilakukan menggunakan *hausman test* dengan asumsi yaitu:

H₀: Model FEM

H_a: Model REM

Pedoman yang digunakan untuk menafsirkan uji *hausman* adalah, jika nilai $p > 0,05$ H_a diterima, jika nilai $p < 0,05$ H₀ diterima. Berdasarkan uji *hausman* diperoleh estimasi sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji *Hausman*.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.347503	3	0.0001

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel hasil uji *hausman* menunjukkan bahwa nilai prob $0.0001 < 0,05$, maka yang terpilih adalah FEM.

Estimasi *Fixed Effect Model***Tabel 3.** Estimasi *Fixed Effect Model*.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8925.457	962.2006	9.276087	0.0000
X ₁	-0.692198	0.614192	-1.127006	0.2628
X ₂	41.16409	3.684066	11.17355	0.0000
X ₃	-0.091399	0.032329	-2.827117	0.0058
R-squared	0.984937	Mean dependent var		9000.008
Adjusted R-squared	0.982860	S.D. dependent var		4500.357
S.E. of regression	589.1935	Akaike info criterion		15.71612
Sum squared resid	30201961	Schwarz criterion		16.05480
Log likelihood	-772.8062	Hannan-Quinn criter.		15.85319
F-statistic	474.0680	Durbin-Watson stat		0.895977
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah, 2026

Model *Fixed Effect* dapat dijelaskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 8925.457\alpha - 0.692198X_{1it} + 41.16409X_{2it} - 0.091399X_{3it} + e \quad (i)$$

Berdasarkan hasil interpretasi pengolahan data, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

$\alpha = 8925.457$ artinya tanpa adanya variabel pengeluaran pemerintah (X_1), pajak daerah (X_2), dan dana bagi hasil (X_3), maka variabel pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 8925.457.

$X_{1it} = -0.692198$, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami peningkatan 1 satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.692198. begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami penurunan 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0.692198.

$X_{2it} = 41.16409$, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami peningkatan 1 satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 41.16409. begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami penurunan 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 41.16409.

$X_{3it} = -0.091399$, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami peningkatan 1 satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.091399. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami penurunan 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0.091399.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Secara Parsial (Uji-t)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi apakah semua variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk uji-t dapat dilakukan dengan pengujian hipotesis dengan melihat nilai probabilitas.

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh pada Tabel 4.3 maka dapat di jelaskan sebagai berikut:

Hasil uji-t pada variabel pengeluaran pemerintah (X_1) diperoleh nilai probabilitas 0.2628 dimana $p\text{-value} > \alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan variabel Pengeluaran Pemerintah (X_1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Hasil uji-t pada variabel Pajak Daerah (X_2) diperoleh nilai probabilitas 0.0000 dimana $p\text{-value} < \alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan variabel Pajak Daerah (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Hasil uji-t pada variabel Dana Bagi Hasil (X_3) diperoleh nilai probabilitas 0.0058 dimana $p\text{-value} < \alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan variabel Pajak Daerah (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Uji Secara Simultan (Uji-F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Pengujian ini bertujuan mendeteksi apakah semua variabel independen secara serentak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk uji signifikan F dapat dilakukan dengan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan melihat $p\text{-value}$ atau nilai probabilitas dari F-statistik. Konsep ini membandingkan $\alpha = 0,05$ dengan nilai probabilitas.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.3, nilai probabilitas statistik sebesar 0.000, dapat disimpulkan bahwa $p\text{-value}$ F-statistik $< \alpha = 0,05$ artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Maka dapat disimpulkan bahwa

variabel Pengeluaran Pemerintah (X_1), Pajak Daerah (X_2), Dan Dana Bagi Hasil (X_3) berpengaruh simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Perhitungan ini koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan dari model yang dipakai. Apabila nilai koefisien determinasi adalah nol, ini menunjukkan bahwa variabilitas dari variabel terkait sama sekali tidak dijelaskan oleh variabel bebas. Sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi adalah satu, maka seluruh variabilitas variabel terkait dapat dijelaskan oleh variabel prediktornya.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*) sebesar 0.984937. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa independen yang terdiri dari Pengeluaran Pemerintah, Pajak Daerah, dan Dana Bagi Hasil mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sebesar 98,49%, sedangkan sisanya yaitu 1,51% ($100\% - \text{nilai adjusted R square}$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Berdasarkan Tabel hasil regresi data panel diperoleh didapatkan probabilitas sebesar 0.2628, $0.2628 > 0,05$ yang dapat diartikan bahwa Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Sedangkan dari nilai koefisien yang didapat adalah sebanyak -0.692198, dari data tersebut memperlihatkan ketika Pengeluaran Pemerintah naik 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar -0.692198 persen. Hasil negatif dari koefisien Pengeluaran Pemerintah menunjukkan hubungan bertolak belakang dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaidi & Setyaningsih (2023) menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah Kota Samarinda diharapkan untuk memperbaiki struktur anggaran belanjanya agar pengeluaran pemerintah tidak banyak dihabiskan untuk belanja operasional saja, melainkan diarahkan pada belanja-belanja produktif agar kedepan mampu mendorong perekonomian di Kota Samarinda.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Koilam *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado, Temuan menunjukkan Nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah (X_1) sebesar 0,856 dan nilai signifikansi sebesar $(0,00) < (\alpha=$

0,05) menandakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Dalam variabel Pajak Daerah yang dilihat dari hasil estimasi diatas didapatkan probabilitas sebesar 0.0000, $0.0000 < 0,05$ yang dapat diartikan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Sedangkan dari nilai koefisien yang didapat adalah sebanyak 41.16409 dari data tersebut memperlihatkan ketika Pajak Daerah naik 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 41.16409 persen. Hasil positif dari koefisien pajak daerah menunjukkan hubungan yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhiyaksa, (2023) menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, dengan nilai determinasi (R^2) sebesar 0,915. Hubungan ini signifikan secara statistik ($p\text{-value} = 0,011$), di mana setiap peningkatan Pajak Daerah berkontribusi pada kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 27,865 satuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah berhasil menjadi sumber pendapatan utama untuk mendanai program pembangunan, yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riandhani *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa Pajak daerah memiliki nilai t statistik sebesar 1,186951 dengan Uji probability signifikansi sebesar 0,2582 dimana $> 0,05$ artinya pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Dalam variabel Dana Bagi Hasil yang dilihat dari hasil estimasi diatas didapatkan probabilitas sebesar 0.0058, $0.0058 < 0,05$ yang dapat diartikan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Sedangkan dari nilai koefisien yang didapat adalah sebanyak -0.091399 dari data tersebut memperlihatkan ketika Dana Bagi Hasil naik 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar -0.091399 persen. Hasil negatif dari koefisien Dana Bagi Hasil menunjukkan hubungan bertolak belakang dengan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pariastana *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) terbukti berpengaruh positif dan signifikan

terhadap PDRB di Kabupaten Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2024. Koefisien positif Dana Bagi Hasil (X_2) sebesar 0,317 dengan $p\text{-value} < 0,05$ menunjukkan DBH berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Transfer pusat melalui DBH terbukti memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani & Poniman, n.d. (2023) menunjukkan bahwa Variabel Dana Bagi Hasil (X_3) menghasilkan nilai t hitung sebesar -2,797 yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ -2,028 dan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, karena baik nilai t hitung maupun nilai signifikansi variabel (X_3) memenuhi kriteria signifikan dalam Uji- t . Diketahui H_a (hipotesis kedua) diterima dan H_0 ditolak berdasarkan hasil di atas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pajak Daerah, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis dari regresi data panel antara variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, nilai probabilitas sebesar $0.2628 > 0,05$ maka hasil akhir diperoleh bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil analisis dari regresi data panel antara variabel Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,05$ maka hasil akhir diperoleh bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil analisis dari regresi data panel antara variabel Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi, nilai probabilitas sebesar $0.0058 < 0,05$ maka hasil akhir diperoleh bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah, Pajak Daerah, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Nilai adjusted R^2 dalam penelitian ini sebesar 0.984937, hal ini berarti kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 98,49%, sedangkan sisanya yaitu 1,51% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pemerintah daerah Aceh harus meninjau kembali struktur pengeluarannya, yang masih didominasi oleh pengeluaran operasional, dan menggesernya ke arah investasi yang lebih produktif. Optimalisasi pembangunan infrastruktur ekonomi, kawasan industri, pelabuhan perikanan, dan industri unggulan daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Penulis berharap bahwa peneliti lain dapat menambahkan variabel-variabel independen yang lain dan juga meneliti dengan penambahan beberapa tahun sebelumnya dan pada tahun-tahun yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Martahadi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra, Bapak Dr. Rinaldi Syahputra, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, serta Bapak Hidayatullah, S.E., M.Sains. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Ahmad Ridha, SP., M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Hidayatullah, S.E., M.Sains. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, waktu, tenaga, dan pemikiran dalam proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Universitas Samudra atas ilmu dan dukungan yang diberikan selama masa studi. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan teman-teman atas doa, motivasi, dan dukungan yang tiada henti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyaksa, N. D. (2023). *Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023*. 1–17.
- Arifin, Y. (2016). Pengaruh Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 5(4), 474–483. *Analysis Journal*, 5(4), 474–483. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i4.22184>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2026). *Data Belanja Daerah 2016-2025*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Ernita, D., Amar, S., & Syofyan, E. (2013). Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, dan konsumsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2). <https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/86478093/752-1610-1-SM-libre.pdf>

- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.*
- Junaidi Agus & Setyaningsih Indahh, (2023). Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Serta Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, Vol. 8 No. 3 (2023): September. <https://doi.org/10.29264/jiem.v8i3.12042>
- Kemenkeu. (2018). *Seri Ekonomi Makro - Teori Pertumbuhan Ekonomi.*
- Nordiawan, Deddi., Iswahyudi Sondi Putra, & Maulidah Rahmawati, (2007). *Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.*
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145–158. DOI: <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i2.218>
- Pariastana, I. N., Akbar, M. F., Naufan, N. A., Annisa, T., & Kunci, K. (2025). Analisis pengaruh BUMD, Dana Bagi Hasil (DBH) dan PAD terhadap PDRB di Kabupaten Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2024. 11, 318–324. <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i4.942>
- Rahmah, basri zein. (2016). *Rahmah AR dan Drs . Basri Zein M . Si , Ak , CPA Fakultas ekonomi dan bisnis , program studi akuntansi , universitas syiah kuala ABSTRACT This study aims to examine the influence of local income , general allocation fund , and revenue sharing fund on Econo. 1(1), 213–220.*
- Ramadhani, D. R., Fadila, W. N., & Safira, N. (2024). TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KALIMANTAN BARAT. 5, 20–37.
- Riandhani, Lutfiona, Puti Andiny, Yani Rizal, and Safuridar Safuridar. (2024). “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh.”. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak Volume. 1 Nomor. 4 Tahun 2024.* <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.648>
- Rizky, R. L., Agustin, G., Mukhlis, I., Ekonomi, J., & Ekonomi, F. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. *JESP*, 8(1). <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58754113/5265-4267-1-SM-libre.pdf>
- Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. 14(2), 115–121. <https://doi.org/10.24198/jmi.v14.n2.2018.115-121>
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Reyribusi Daerah. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.*
- Sukirno, Sadono. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Makro Ekonomi.* Jakarta: Jakarta Press.
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 11 Juli 2006.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara, 15 September 2009.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.

Wandira, & Arbie Gugus. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.